



PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
ꦑꦼꦢꦭꦸꦠꦤꦫꦏꦿꦠ

Kepathin Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website : <http://jogjaprov.go.id> email : dispertaru@jogjaprov.go.id Kode pos 55213

PEMBERITAHUAN
Nomor : 500.17/3552/2024

TENTANG

RENCANA PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA-KULON PROGO SEKSI 1 DAN SEKSI 2 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan Seksi 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkenaan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo:

a. Maksud

Maksud dari Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas serta kapasitas jaringan jalan antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta memberikan opsi transportasi dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan jalan yang ada saat ini dan waktu tempuh lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing melalui pengurangan biaya distribusi dan menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional serta akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo adalah:

1) Pengembangan Jalan Tol yang bermanfaat untuk memicu pengembangan wilayah sekitar karena pengaruh aksesibilitas yang semakin tinggi dan penghematan biaya perjalanan bagi pelaku pergerakan.

2) Meningkatkan aksesibilitas daerah untuk mendorong minat swasta dan

masyarakat dalam pengembangan wilayah sehingga meningkatkan perekonomian dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

3) Untuk mengurai kemacetan di wilayah Solo dan D.I. Yogyakarta dengan memberikan alternatif kepada pengguna jalan yang mengakomodir lalu lintas dari dan ke Pusat Kota, Kawasan Wisata dan Residensial yang berdampak pada peningkatan ekonomis bagi keperluan wilayah perkotaan dan waktu tempuh di wilayah Solo, D.I. Yogyakarta dan sekitarnya.

4) Mengakomodir pergerakan kendaraan dari Utara-Selatan maupun sebaliknya, sehingga dinilai perlu penambahan jaringan Jalan Tol baru untuk mengurangi beban lalu lintas pada ruas jalan eksisting Solo-Yogyakarta yang semakin berat karena selalu dipergunakan oleh sebagian besar kendaraan yang masuk/keluar dari pusat kota Solo dan Yogyakarta.

2. Letak Tanah dan Luas Tanah yang Dibutuhkan

a. Lokasi rencana Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan Seksi 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta

1) Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman

2) Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman

3) Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan , Kabupaten Sleman

4) Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman

5) Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman

6) Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman

7) Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping , Kabupaten Sleman

8) Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman

9) Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati , Kabupaten Sleman

10) Kalurahan Tilogadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman

11) Kalurahan Tirtoadi , Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman

b. Perkiraan luas tanah yang dibutuhkan adalah seluas ±85.702,80m2 (kurang lebih delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua koma delapan puluh meter persegi).

3. Tahapan Rencana Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yakni :

a. Tahap Perencanaan, yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

b. Tahap Persiapan yang dilaksanakan oleh Tim Persiapan, dengan tugas:

1) Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;

2) Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;

3) Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;

4) Menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;

5) Mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan;

6) Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh Gubernur.

c. Tahap Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta setelah Penetapan Lokasi ditetapkan oleh Gubernur;

d. Tahap Penyerahan Hasil, yaitu hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh

Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi yang memerlukan tanah.

4. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan Seksi 2:

a. Tahun Anggaran 2024

- Tahapan Persiapan
- Pembentukan Tim Persiapan
- Pemberitahuan rencana pembangunan
- Pendataan Awal
- Konsultasi Publik
- Penetapan Lokasi
- Pengumuman Penetapan Lokasi

b. Tahun Anggaran 2024 s.d 2025

1) Tahapan Pelaksanaan

- Pembentukan Panitia Pelaksanan Pengadaan Tanah
- Pembentukan Satgas A dan Satgas B
- Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi oleh Satgas A dan Satgas B
- Verifikasi hasil inventarisasi dan identifikasi
- Penetapan hasil inventarisasi dan identifikasi
- Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi
- Revisi hasil inventarisasi dan identifikasi (apabila diperlukan)
- Pengadaan appraisal
- Penetapan appraisal
- Pelaksanaan penilaian oleh appraisal
- Verifikasi hasil penilaian
- Penyampaian nilai ganti rugi dan musyawarah bentuk kerugian
- Pelaksanaan pembayaran ganti rugi
- Tahapan Penyerahan Hasil

5. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan Jangka waktu pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan Seksi 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta direncanakan dimulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Juni 2024


Drs. BERRY SUHARSONO, M.Si
NIP. 19650512 198602 1 002

PENEKANAN PRESIDEN DI IKN

Pembangunan Fasilitas Pendukung

PENAJAM PASER UTARA (KR) - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan fasilitas pendukung di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan akomodasi, transportasi dan konsumsi masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama pembangunan PT Arena Graha Andalan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, Rabu (5/6). "Kegiatan di IKN ini meningkat sangat pesat. Kita membutuhkan akomodasi, membutuhkan transportasi, membutuhkan fasilitas-

fasilitas lainnya," ujar Presiden. Kepala Negara menyoroti kebutuhan fasilitas akomodasi yang masih sulit ditemukan di kawasan IKN. Presiden juga mengapresiasi pembangunan Arena Botanica yang segera dimulai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. "Sampai sekarang kalau saya membawa rombongan 200 sampai 300 orang, tempatnya belum ada.

Jadi saya sangat menghargai investasi yang akan dibangun ini, Arena Botanica dari Arena Group, yang kita harapkan untuk memacu agar menteri-menteri segera mau pindah ke sini," jelasnya. Selain akomodasi, Presiden juga menyoroti kebutuhan fasilitas kuliner di kawasan IKN. Presiden menjelaskan, menemukan tempat makan yang layak menjadi tantangan bagi masyarakat yang tinggal dan bekerja di IKN. "Karena memang problem besar di sini kalau sudah mau makan siang dan malam, kita mau makan malam bawa chef dari Jakarta masak sendiri," ungkap Presiden. Presiden Jokowi berharap pem-

angunan Arena Botanica, yang akan mengintegrasikan lima merek restoran ternama, diharapkan dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Presiden menghargai PT Arena Graha yang mengintegrasikan lima brand resto ternama, sehingga nantinya Seribu Rasa, Penang Bistro, Greyhound Cafe, Maison Tatsuya dan Yakniku bisa segera dibuka. Presiden Jokowi menginstruksikan agar mempercepat penyelesaian proyek ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di IKN. Dengan adanya pembangunan Arena Botanica, fasilitas di IKN diharapkan makin lengkap dan memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. **(Ant)-d**

Strategi Bawaslu

Cegah Pelanggaran di Pilkada 2024

JAKARTA (KR) - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memaparkan strategi Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pilkada 2024 dengan mengikuti rangkaian penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) mengenai penyusunan daftar pemilih. "Selain itu, perlu ada penambahan pasal terkait pemberian akses Sidalih kepada Bawaslu. Kemudian, perlu diperjelas otoritas yang mengeluarkan surat keterangan kematian, jenis dokumen lainnya serta pihak yang mengeluarkan dokumen lainnya," kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/6). Bagja menambahkan, pengawas pemilu telah melakukan inventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu terakhir sebagai bahan analisis data. Adapun hasil inventarisasi yang dilakukan dengan ketentuan data potensial pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pemilih meninggal dunia, pemilih yang beralih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili dan pemilih yang beralih status menjadi WNA. "Lalu data potensial pemilih Memenuhi Syarat (MS), pemilih yang beralih status dari TNI/Polri, pemilih DPK, pemilih pemula dan pemilih yang beralih status dari WNA menjadi WNI," ujarnya. **(Ant)-f**

RUU Polri Bakal Dibahas Terbuka

JAKARTA (KR) - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto memastikan pembahasan revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bakal digelar secara terbuka. Dengan begitu, menurutnya, jika ada pasal-pasal yang dinilai membahayakan dalam RUU tersebut seluruh pihak bisa mengawasi. Namun, katanya, agenda pembahasan RUU tersebut belum sampai di Komisi III DPR. "Di sana kan kalian nonton semua, *nggak* ada pembahasan tertutup. Jadi jangan terlalu bercuriga," kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. (5/6) Ia menilai, saat ini siapapun pasti memiliki pandangan-pandangan dari sisi negatif terhadap RUU tersebut menyusul berbagai isu yang berkembang. Namun, ia memastikan ketika nantinya RUU itu dibahas di Komisi III DPR, seluruh pihak bisa membaca isinya bersama-sama. Bambang Wuryanto menjelaskan, saat

ini pembahasan RUU tentang Polri belum dilakukan di Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum dan keamanan tersebut. Karena RUU tersebut masih belum dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. "Kita yang pegang nomor punggung, nendang bola, kita pemain. Tetapi di sana kan kalian nonton semua," katanya. Sebelumnya, RUU Polri disetujui menjadi RUU yang merupakan usul inisiatif DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (28/5). Saat itu, rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Persetujuan revisi UU Polri menjadi RUU usul inisiatif DPR RI tersebut dilakukan bersamaan dengan tiga revisi UU lainnya, yakni RUU tentang Perubahan atas UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan RUU tentang Perubahan atas UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). **(Ant/Obi)-d**

SOAL EMAS ILEGAL 109 TON

Kejagung Telusuri Asal Muasalnya

JAKARTA (KR) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mendalami asal muasal pemasok 109 ton emas ilegal yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang (Persero) atau Antam. Sebanyak 109 ton emas yang diproduksi dengan cap Antam tersebut asli, dan hanya beredar di Indonesia. "Emas itu peredarannya semua ada di Indonesia, cuma sumber emas itu juga bisa berasal dari luar negeri, sebagian juga berasal dari penambang-penambang ilegal dan pengusaha ilegal, ini masih kami dalam semua," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Jakarta, Rabu (5/6). Menurutnnya, emas 109 ton itu diproduksi menjadi logam mulia (LM) Antam tanpa melalui verifikasi dan prosedur yang benar. Namun demikian, LM Antam masih berlaku dan memiliki nilai jual, dan bisa juga dijual lagi ke Antam. "Saya kira tidak jadi masalah, pasti emasnya akan diterima oleh PT Antam, karena emas yang beredar itu emas asli. Cuma yang kami hitung kemarin itu, karena dia (emas) kami anggap ilegal sehingga beberapa pendapatan negara terhadap legalisasi cap PT Antam itu menjadi berkurang dan hilang," kata Ketut. **(Ant/Has)-d**

KPK TUNGGU PENYIDIKAN SELESAI

Tersangka Korupsi di DJKA Lebih 10 Orang

JAKARTA (KR) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lebih dari 10 orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Namun KPK belum bisa menyampaikan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "KPK menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, lebih dari 10 orang sebagai tersangka dari para ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan, dua korporasi, dan satu orang swasta," kata Kepala Bagian Pemberitaan DPR (DJ-KPK) Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/6). Ali mengatakan, pengumuman nama tersangka dilakukan setelah proses penyidikan rampung. "Setelah proses penyidikan, pengumpulan alat bukti, dan lain-lainnya kebutuhan untuk itu selesai, pasti kami akan umumkan nama-nama dari pihak yang menetapkan sebagai tersangka baik orang-orang maupun korporasi," ujarnya. Penetapan tersangka dan tersangka korporasi ini berawal dari pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bawasta," kata Kepala Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. KPK

lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwi-farita Fajarkharisma) Muhammad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD). **(Ant/Has)-f**



KR-Antara/Hendra Nurdiansyah

TUNTUT RESTORASI LAHAN: Aktivis melakukan aksi di depan Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY di Baci, Yogyakarta, Rabu (5/6/2024). Koalisi Primates Fight Back dan Jogja Animal Friend mendesak Pemerintah untuk melakukan restorasi lahan di Kabupaten Gunungkidul yang mengalami alih fungsi dan mengakibatkan satwa liar kehilangan habitatnya.